

Hegemoni Kapitalisme Dalam Transisi Demokrasi di Indonesia

Analisis Wacana Kritis

Basuki Agus Suparno
Arif Wibawa
Program Studi Ilmu Komunikasi
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta
Email: basuki.agus@gmail.com, wibawaarif@yahoo.com

Abstract

This article assumed that economical crisis that was happened in Indonesia as a way for capitalistic and liberalization power to intervene and open the market. Therefore, when the government invited IMF (International Monetary Fund) and WB (World Bank) to lessen the crisis, these financial institutions gave the receipts that must be implemented. Based on Michael Foucault's conception about discourses, this article was aiming to understand three dimensions of narration about contestation among capitalistic concerns toward Indonesia government. First, the conceptual structure which explained terminologies were designed to pursue the interest. Second, the structure of knowledge which enstructure the realities were contested. And third, the discourses formation which articulated the substance of realities reflected the whole of crisis. By scrutinizing Kompas daily during April to May 1998, this article tried to understand three of dimensions as mentioned above. The results showed us that the international financial institutions as capitalistic and liberalization power dictated the receipts and their interest for Indonesia's solution over crisis that was happened.

Keywords: *Episteme, Discourses formation, hegemonic, and international financial institutions*

Abstrak

Artikel ini berangkat dari asumsi bahwa krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia digunakan sebagai cara bagi kekuatan kapitalistik dan liberalisasi untuk mengintervensi dan membuka pasar. Oleh karena itu ketika pemerintah Indonesia mengundang IMF dan WB untuk mengurangi krisis, kedua lembaga keuangan dunia tersebut memberikan resep yang harus diimplementasikan. Berdasarkan pada konsepsi wacana Michael Foucault, artikel ini ditujukan untuk memahami tiga aspek analisis wacana Foucault yakni pertama, struktur konseptual yang menjelaskan sejumlah terminologi yang digunakan untuk mencari kepentingan dari masing-masing pihak yang berkontestasi. Kedua, struktur pengetahuan yang menstruktur gagasan tertentu terhadap hal yang dikontestasikan. Ketiga, formasi wacana yang mengartikulasikan secara keseluruhan gagasan dan narasi tentang krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia. Dengan meneliti harian Kompas selama bulan April dan Mei 1998, tulisan ini dimaksudkan untuk mengungkapkan tiga hal tersebut. Hasilnya, kekuatan kapitalistik dan liberalisasi mendiktekan kepentingan atas krisis yang tengah terjadi di Indonesia

Kata kunci: *Episteme, formasi wacana, hegemoni, dan lembaga keuangan dunia*

Pendahuluan

Tulisan ini berangkat dari asumsi bahwa kekuatan ekonomi pasar bebas, yang umumnya masuk sebagai anggota WTO (*World Trade Organization*) turut berkontribusi memicu terjadinya pergerakan Reformasi termasuk di Indonesia pada beberapa tahun lalu. Bahkan setelah berlangsung lebih dari satu dekade lebih-hingga mendekati dua dekade ini, indikasi yang memenangkan gerakan Reformasi tersebut pada kepentingan domestik tidak terbukti, sebagai gantinya kekuatan ekonomi pasar yang memenangkannya. Masyarakat Indonesia menjadi sebuah negara yang sangat liberal di berbagai sektor kehidupannya dengan kecepatan yang pincang untuk mengikutinya.

Dampak dari perbenturan antara negara dan kekuatan ekonomi kapitalis yang dimainkan IMF (*International Monetary Fund*) dan WB (*World Bank*) sepenuhnya diarahkan untuk meruntuhkan praktek-praktek kekuasaan yang dinilai otoriter dan tidak berpihak pada pasar bebas. Pemerintahan Orde Baru dipandang negara yang dijalankan secara otoriter, tertutup dan menerapkan proteksi terhadap sejumlah komoditas ekonomi tertentu. Sementara itu, hampir corak kekuasaan yang dikembangkan di Asia dan Asia Tenggara, merupakan praktek kekuasaan yang tidak sepenuhnya menerima paham kapitalisme dan liberalisme karena persoalan ideologi dan kultur kekuasaan.

Ada empat perspektif yang merupakan kebijakan IMF dan WB dalam memberi dan memobilisasi dananya ke negara-negara yang terkena krisis ekonomi termasuk Indonesia: a) memperketat kebijakan moneter dengan meningkatkan suku bunga, membendung devaluasi dan menghambat inflasi; b) pada sektor finansial yang lemah dilakukan strukturisasi dan rekapitalisasi terhadap lembaga-lembaga yang *viable*, sedangkan yang tidak harus ditutup, di-*merger* dengan yang lebih kuat; c) memastikan kebijakan fiskal yang memfokuskan pada ketersediaan cadangan eksternal dan melakukan restrukturisasi perbankan dan sistemnya; d)

meningkatkan sektor publik dan korporat pemerintah dengan mendesain dan meningkatkan efisiensi pasar, memecah kedekatan antara bisnis dan pemerintah serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas yang menjamin integrasi ekonomi nasional dengan pasar keuangan internasional (Camdessus, 1999)

IMF dan WB merupakan dua lembaga keuangan dunia yang dapat dipandang sebagai representasi kekuatan ekonomi kapitalistik yang berorientasi pada mekanisme pasar bebas dan liberalisme ekonomi politik. Dalam catatan yang sangat tajam, Stiglitz (2003) mengatakan bahwa IMF dan penganjur kesepakatan Konsensus Washington lainnya menjadi pihak-pihak yang paling mengutuk korupsi, tetapi bila dicermati mereka sendiri yang mendorong privatisasi dan liberalisasi ekonomi, membuat mereka lalai memberi perhatian selayaknya pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. IMF dan WB setidaknya justru berperan melanggengkan korupsi tersebut dengan kelalaiannya.

Kapitalisme dan liberalisme sebagai kekuatan ekonomi telah mendominasi sedemikian rupa dalam berbagai sistem perekonomian di dunia. Tarik ulur kekuatan global dan lokal terjadi di berbagai arena ekonomi, seperti dalam komoditas, pasar modal dan perbankan. Konflik ini menjadi perhatian sejumlah media. Bahkan menurut catatan konflik ini sebagai “perang” wacana dan aksi antara pemerintah dari negara-negara yang berusaha menahan arus liberalisasi dan kapitalisme dengan lembaga-lembaga liberal seperti IMF dan World Bank. Dalam kasus di Indonesia pada tahun 1998-an jumlah artikel dari suatu media yang menyebut Indonesia melebihi 5000 kali (Berg, 1999). Wacana di dalamnya merupakan bagian tersendiri dari wacana yang mungkin lain sama sekali dengan wacana yang diproduksi sekarang ini oleh media yang ada.

Dalam pandangan Michael Foucault dalam Littlejohn (2002:220), bahwa setiap episode jaman menghasilkan dan memproduksi *episteme*-semacam narasi jaman yang tidak dapat diperbandingkan dengan jaman yang lain. Era krisis moneter memiliki narasi jamannya.

Sebelumnya, jaman Orde Baru terdapat narasi utama yang memaparkan tentang pengetahuan Orde Baru. Rentang waktu selama 32 tahun berkuasa, pasti terdapat banyak narasi yang telah dihasilkan yang membentuk cerita besar tentang Orde Baru hingga keruntuhannya. Demikian pula era Reformasi menghasilkan dan memperlihatkan adanya *epistemology* tersendiri. Masing-masing memiliki narasi yang tidak dapat diperbandingkan, pernah menjadi dominan dan kemudian bergeser ke narasi baru.

Ada tiga hal yang paling krusial ketika Foucault menjelaskan karakteristik wacana yang ditawarkannya. Pertama, apa yang disebut sebagai struktur konseptual. Bagi Foucault, bahwa setiap jaman memiliki struktur pengetahuan yang unik dan mandiri. Dalam masa transisi demokrasi pada tahun 1998-an, struktur konseptual yang hidup dan berkembang dalam praktek-praktek wacana kala itu adalah mengenai krisis ekonomi dan krisis politik. Struktur konseptual masyarakat dalam kekuatan wacana pada saat itu terletak pada suatu kontinum tertentu dan bergeser serta berubah ketika episode jamannya telah masuk pada era Reformasi dan tidak lagi pada fase transisi demokrasi.

Kedua, struktur konseptual yang diproduksi pada suatu jaman tertentu pada gilirannya menentukan karakteristik pengetahuan jaman. Dalam masa transisi demokrasi, di mana kekuatan kapitalisme dan liberalisme memiliki ruang dalam melakukan intervensi ekonomi dengan dalih melakukan penyelamatan atas keterpurukan ekonomi di Indonesia, maka karakteristik pengetahuan yang berkembang saat itu adalah tentang restrukturisasi, fiskal, kekuatan mata uang, pasar bebas, privatisasi, *merger*, likuidasi, dan sebagainya. Semua istilah tersebut sekaligus cerminan dari konsep dan gagasan yang menentukan karakteristik pengetahuan jaman yang diproduksi oleh masyarakat secara keseluruhan.

Ketiga, terdapat formasi wacana yang membuat cerita besar tentang krisis ekonomi di Indonesia yang di dalamnya terdapat berbagai cerita kecil, seperti kenaikan harga barang-barang

pokok, penutupan perusahaan dan perbankan, pemutusan hubungan kerja, dan pelarian modal keluar negeri. Pada sisi lain, IMF dan WB dinarasikan sebagai dewa penyelamat terhadap apa yang sesungguhnya terjadi. Ketergantungan penyelesaian ekonomi terhadap kedua lembaga perbankan internasional yang kapitalistik ini menjadi narasi lain dalam keseluruhan *episteme*-seperti yang dikemukakan Foucault (Littlejohn, 2002:220-223).

Jadi, apa yang dimaksud dengan struktur wacana dalam pengertian ini adalah seperangkat hal yang melekat secara inheren dalam jaman tersebut yang menentukan bentuk dan substansinya. Di sini tulisan yang disarikan dari hasil penelitian berusaha mencari jawaban atas persoalan yang terkait dengan produksi dan reproduksi komunikasi sebagai narasi jaman ketika hegemoni kekuatan kapitalisme dan liberalisme masuk mengintervensi sistem perekonomian di Indonesia. Kedatangan mereka secara terpaksa diundang oleh pemerintah Indonesia karena dinilai memiliki resep yang ampuh dalam menyelesaikan krisis ekonomi yang bersifat multidimensional.

Meskipun setiap jaman memproduksi praktek-praktek wacana tersendiri dan telah menjadi masa lalu, bukan berarti hal ini sebagai sesuatu yang tertutup. Banyak artifak-artifak komunikasi yang dapat disebut sebagai arkeologi komunikasi dapat ditelusuri, diteliti dan dipahami kembali terhadap apa yang menjadi struktur diskursif dan struktur pengetahuan yang telah dihasilkan pada masa lalu tersebut. Arkeologi komunikasi ini dapat terwujud dan berwujud banyak hal seperti dokumen-dokumen, foto-foto, tulisan-tulisan, cerita-cerita, pidato-pidato, pemberitaan, ukiran, patung, puisi, lukisan, simbol-simbol, desain, bentuk arsitektur dan musik. Semua ini sebagai artifak-artifak komunikasi yang sangat penting dalam upaya memahami *episteme*-narasi utama tentang apa yang terjadi pada episode jaman tertentu.

Salah satu artifak komunikasi yang dapat mengungkapkan banyak hal tentang praktek-praktek komunikasi dalam episode jaman

adalah media massa baik televisi atau surat kabar. Kekuatan media massa dalam merekam kejadian komunikasi tidak diragukan lagi. Dalam pemikiran ini, kekuatan media diyakini mampu membuat masyarakat melakukan hal yang sama terhadap apa yang dilakukan media. *What do media do to people*—telah menjadi kajian utama dalam melihat kekuatan media terhadap masyarakat. Walter Lippman (1992) misalnya menggambarkan kekuatan ini sebagai “picture our head”. Apa yang dianggap penting media juga akan dianggap penting masyarakat. Apa yang dibicarakan media juga akan dibicarakan oleh masyarakat.

Sebaliknya, masyarakat sebagai subyek yang tidak pasif mempengaruhi dan menentukan corak dari media tersebut. Masyarakat memiliki cara dan mekanisme tersendiri di dalam memproduksi, mempersempit atau memperluas produksi wacana yang dilakukan media. Kebutuhan sosiologis dan psikologis yang dimiliki individu membuat masyarakat memiliki cara dalam menilai dan menentukan kebutuhannya terhadap segala bentuk informasi yang diterima. Pada saat bersamaan dalam interaksi sosial, ekonomi, politik dan budayanya, mereka memproduksi praktek-praktek wacananya sendiri, yang unik, distingtif dan diferensiatif yang sedikit banyak bisa sama atau berbeda dengan wacana media.

Dengan demikian, apa yang menjadi kelemahan media, yang dikatakan sebagai realitas tersendiri—sebab realitas media tidak sama dengan realitas sosial, tetap relevan untuk menjadi objek kajian, karena bagaimana pun realitas media tetap merupakan cerminan dari realitas sosial. Sedangkan realitas sosial terdiri dari aktivitas-aktivitas komunikasi. Dalam kehidupannya, manusia tidak mungkin menghindari aktivitas komunikasi. “Kita tidak dapat tidak berkomunikasi”. Kehidupan masyarakat menjadi berarti ketika di dalamnya diisi dengan aktivitas komunikasi.

Atas dasar pertimbangan tersebut, kajian ini memberi perhatian pada surat kabar Kompas, dalam merekam praktek-praktek komunikasi

yang memperlihatkan hegemoni kapitalistik pada jaman di mana Indonesia terkena krisis ekonomi pada tahun 1998 yang lalu. Sebagai realitas media yang bukan sebagai realitas sosial—merupakan cerminan dari realitas sosial, kajian ini bertumpu pada satu cermin realitas sosial.

Pokok permasalahan dalam kajian ini terletak pada upaya mengkonstruksikan kembali narasi besar yang terjadi dalam situasi krisis ekonomi terutama melihat bagaimana kekuatan hegemonik kapitalistik berusaha mengontrol corak kehidupan perekonomian di Indonesia yang berimbas pada kehidupan sosial, budaya, dan politik masyarakat Indonesia. Kajian ini berusaha kembali mengkonstruksikan struktur pengetahuan dan formasi wacana yang berkembang pada saat itu terutama melihat kekuatan hegemonik kapitalisme memberikan resep penyelesaian ekonomi di Indonesia.

Tujuan pokok kajian ini adalah melacak kembali struktur pengetahuan dan formasi wacana yang telah diproduksi dalam menangani krisis ekonomi yang terjadi pada masa lalu. Ini menjadi bahan kontemplatif setidaknya hal ini menjadi pengalaman berharga ketika menghadapi krisis tertentu, bangsa Indonesia dapat memperjuangkan apa yang menjadi kepentingan nasionalnya sendiri, ketimbang diserahkan kepada kekuatan lain yang orientasinya semata-mata untuk menguasai pasar dan sistem ekonomi tertentu. Ingatan terhadap ini patut dibangkitkan kembali agar tidak lupa dan menyadari bahwa di atas kepentingan politik yang sempit, di sana terdapat kepentingan politik dan ekonomi yang lebih besar yakni menyelamatkan harkat dan martabat sebagai bangsa. Kesadaran dan perlawanan terhadap bentuk hegemonistik kapitalistik ini tetap perlu diingatkan kembali.

Antonio Gramsci mendiskusikan panjang lebar tentang hegemoni yang merupakan kritik terhadap kapitalisme yang diartikan sebagai sebuah sistem sosial yang didasarkan pada motif keuntungan dan dominasi terhadap relasi komoditas termasuk komoditas terhadap kaum buruh (Palan,2000:10). Dengan munculnya perdagangan global, berdirinya GATT dan

berubah menjadi WTO, perdagangan bebas dipandang sebagai eksploitasi dengan skala yang lebih luas dan lebar yang menempatkan sumber daya alam dan manusia menjadi sumber perebutan.

Dalam pandangan Braudel (*Forbes*, 21 Juni 1982) kaum kapitalis merupakan spekulator dan pemegang monopoli yang berada dalam posisi memperoleh keuntungan besar tanpa menanggung banyak resiko atas sebagian besar dari perekonomian pasar. Kunio (1990) mengakui bahwa di dalam hukum pasar bebas selalu terdapat spekulator yang mencari keuntungan tanpa perlu mepedulikan siapa yang dirugikan atas tindakannya tersebut.

Dalam proses industrialisasi dan liberalisasi, negara-negara dunia ketiga mengalami persoalan yang lebih pelik karena harus berhadapan dengan perusahaan multinasional yang sudah menggurita. Proses ini diambilalih oleh perusahaan-perusahaan asing bukan saja menguasai teknologi tetapi juga menguasai pasar internasional. Dari sana pemikiran tentang kapitalisme dengan prinsip-prinsip ekonomi pasar bebas terus berkembang.

Bersamaan dengan itu, asumsi-asumsi penting tentang relasi ekonomi pasar, intervensi negara dan demokratisasi seolah menjadi tema sentral. Sebuah negara otoriter dikaitkan dengan sistem tertutup dari praktek-praktek ekonominya, sedangkan negara yang menggunakan mekanisme pasar bebas dikaitkan dengan negara demokratis dan terbuka. Contoh, dalam sebuah seminar: *Capitalism, Socialism and Democracy*, Schumpeter berpendapat bahwa demokrasi modern adalah produk dari kapitalisme (*International Journal on World Peace*, Vol 17, issue3,2000).

Hubungan-hubungan semacam ini ditandai dengan pemikiran tentang demokrasi dan ekonomi. Apakah ada relasi antara kondisi ekonomi sebuah negara dengan kualitas demokrasi yang dijalankan. Kompleksitas relasi antara ekonomi, politik dan negara menghasilkan sejumlah kepentingan tertentu. Tema-tema utama penganjur dan penganut ekonomi pasar

bebas selalu mengaitkan pada prinsip persaingan bebas. Bersamaan dengan itu, isu-isu mengenai pemerintahan yang bersih, pemberdayaan masyarakat sipil dan penegakan hukum melekat secara inheren.

Jika dicermati, apa yang terjadi di Indonesia pada saat krisis ekonomi pada tahun 1998 dulu, dapat dibedah dengan analisis dan asumsi-asumsi tersebut. Pelaku-pelaku bisnis di Indonesia diwarnai dengan praktek-praktek rente. Distribusi kesempatan berbisnis terjadi sangat terbatas dan tertutup. Negara dianggap terlalu jauh melakukan intervensi pasar. Sementara kualitas intervensi semakin jauh dan membabi buta.

Seperti yang dikatakan Schumpeter, pandangannya menyakinkan bahwa semakin makmur sebuah bangsa, semakin besar peluang ia akan tetap mempertahankan demokrasi. Hubungan antara ekonomi dan demokrasi berbanding lurus. Demokrasi dan ekonomi pasar bebas yang dianut dalam kapitalisme dipandang sebagai resep yang sangat ampuh diterapkan di mana pun dan di negara mana pun juga.

Namun dalam beberapa kenyataan menunjukkan bahwa mekanisme pasar tidak pernah berjalan sempurna. Selalu terjadi kesenjangan yang menjadikan di dalam mekanisme ekonomi pasar bebas terjadi penguasaan tertentu atas yang lain. Menurut Joseps E Stiglitz (2003), pasar bebas telah terbukti secara ilmiah tidak bisa berjalan secara sempurna. Ideal pasar bebas sempurna hanya bisa berjalan salah satunya bila ada informasi yang sempurna. Sedangkan kesempurnaan informasi dari jumlah informasi yang diterima, cara mendapatkan informasi, bagaimana mengalirnya, hampir dipastikan tidak dapat dikontrol sesuai keinginan tertentu. Setiap pihak berusaha menguasai dan mengontrol sumber informasi tertentu sehingga dengan demikian syarat informasi sempurna tidak akan pernah terjadi.

Dengan perkataan lain, Stiglitz hendak mengatakan bahwa kondisi pasar selalu berada dalam situasi asimetri informasi-yakni selalu terjadi ketidakseimbangan informasi. Dalam

situasi semacam ini ekonomi pasar bebas yang ideal dan sempurna tidak akan pernah terjadi. Pasar selalu dalam keadaan imperfek. Karena itu, bagaimana pun, pasar membutuhkan regulasi dan tidak dibiarkan kekuatan hegemonik menguasainya. Dalam konteks ini, regulator yang mempunyai kekuatan mengendalikan dan mengatur mekanisme pasar adalah pemerintah atau negara. Absennya Negara atau pemerintah dalam mekanisme ekonomi pasar bebas hanyalah akan diisi oleh kekuatan kapitalistik yang hegemonik yang bersifat spekulatif dan berorientasi pada mencari keuntungan semata tanpa memperdulikan kerugian pihak lain.

Banyak literatur (Stiglitz, 2003; Kunito, 1990) membicarakan tentang intervensi pemerintah terhadap pasar, mengambil kesimpulan yang berbeda-beda. Namun jarang ditemui yang mengatakan bahwa intervensi itu tidak diperlukan sama sekali. Kunito masih berpendapat bahwa intervensi pemerintah terhadap ekonomi tetap diperlukan. Pemerintah tetap harus mengendalikan mekanisme tersebut dengan regulasi yang menjamin perekonomian berjalan secara wajar.

Indonesia sebagai negara bangsa juga telah mengambil posisi yang tegas yang terlihat dalam hukum dasar negara bahwa bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Artinya, dalam posisi demikian, pemerintah Indonesia harus melibatkan dan terlibat dalam pengaturan dan pengendalian sumber daya ekonomi yang tidak dibiarkan dikuasai kekuatan kapitalisme.

Sebenarnya, pada level negara, hubungan antar negara pun menghasilkan konflik kepentingan. Negara maju yang umumnya berkepentingan bagi terbukanya pasar di negara-negara lain di dunia, tampil di depan sebagai penyeru dari ajaran ekonomi pasar ini. Dalam fase lanjut negara-negara ini membentuk kaukus ekonomi dan politik seperti G-7, WTO, MEE (Masyarakat Ekonomi Eropa) dan sebagainya. Dalam kaukus ini negara-negara tersebut menjadi kekuatan penentu yang memberi batasan

sesuai dengan kepentingan mereka sehingga negara-negara lain yang tidak masuk dalam kaukus tersebut ketika bersinggungan dengan kepentingan mereka, mau tidak mau mengikuti apa yang telah mereka persyaratkan.

Krisis mata uang sampai kapan pun tetap merupakan ancaman yang terus menghantui negara-negara yang sedang berkembang. Hal ini tidak semata-mata terjadi pada tahun 1998 yang lalu saja dan seolah tidak mungkin terjadi kembali. Sepanjang mekanisme ekonomi pasar ini dibiarkan bekerja secara liar, bukannya tidak mungkin sistem perekonomian suatu bangsa dan negara terpuruk karena dipermainkan oleh kekuatan kapitalisme. Kerja keras yang luar biasa pun sebagai upaya mencapai suatu derajat kemajuan tertentu dari suatu bangsa, menjadi tidak ada artinya, ketika mata uang yang mereka pakai dimainkan oleh kekuatan kapitalisme dan para spekulan serta mengalami penurunan nilai secara drastis. Apa yang mereka hasilkan sebagai jerih payah dan kerja kerasnya rontok oleh jatuhnya mata uang yang digunakannya.

Sekali lagi, melalui tema-tema tersebut, wacana mengenai kekuatan kapitalisme dalam masa transisi demokrasi di Indonesia menjadi persoalan yang tetap relevan untuk kembali dilihat dan diingat kembali. Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa setiap jaman memproduksi wacananya sendiri dan masing-masing wacana jaman tidak dapat diperbandingkan satu sama lain. Setiap wacana suatu jaman memiliki karakteristiknya sendiri dan distingtif.

Teori wacana kritis seperti pemikiran Van Dijk, Ruth Wodak, Norman Fairclough, Michael Foucault, hingga Jurgen Habermas, mendiskusikan landasan-landasan apa yang mempengaruhi beroperasinya isi media khususnya media massa. Sekalipun, mereka tidak semuanya memberi perhatian yang sama besar dan bobotnya terhadap media massa. Dalam teori-teori ini disebutkan bahwa isi media merupakan bagian integral dari aspek-aspek sosial dan kultural yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. David T Hill (2000) berpendapat bahwa produk media

merupakan hasil dari sebuah proses sosial yang terjadi dalam sebuah kerangka institusional.

Shoemaker dan Resse (1996:31) kemudian mempertanyakan apakah media mencerminkan realitas. Keduanya berpendapat bahwa isi media merupakan bagian integral dari budaya. Sementara budaya diimplementasikan dalam banyak cara. Ada yang melihat isi media dari sisi artistik, psikoanalisis, antropologi, mitologi, ritual dan sebagai aktivitas bisnis serta politik. Isi media, karenanya, dijadikan titik mula dalam memahami budaya dan kekuatan seperti apa yang beroperasi di dalamnya.

Kajian wacana merupakan kajian komunikasi yang melibatkan struktur konseptual dan formasi yang dihasilkan dari penggunaan simbol dan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Analisis wacana kritis merupakan kajian kritis dalam dua hal yakni, pertama didasarkan pada gagasan-gagasan Marxian dan kedua pada penggunaan bahasa yang berkaitan dengan praktek-praktek kekuasaan dan relasinya. Secara spesifik analisis wacana kritis ini berpijak pada analisis wacana yang dikembangkan Foucault dengan konsep utamanya tentang *episteme* dalam arekologi komunikasi yang membentuk narasi besar dalam setiap episode jamannya.

Metode Penelitian

Dalam penelitian, terdapat paradigma penelitian yang saling berkompetisi satu sama lain dalam melihat sebuah fenomena komunikasi yang ingin diteliti. Paradigma dipandang sebagai *a set of beliefs* (Guba and Lincoln, 1994:107). Ia merepresentasikan sebuah *worldview* yang mendefinisikan realitas yang ada, posisi individu, dan sejumlah kemungkinan hubungan antara hal-hal tersebut. Hal ini yang akan menentukan apa yang dilakukan peneliti: *what it they are about and what falls within and outside the limits of legitimate inquiry* (Guba and Lincoln, 1994:108).

Metode penelitian yang digunakan adalah analisis wacana yang dikembangkan oleh Michael Foucault yang melihat wacana ke dalam tiga bentuk, yakni struktur konseptual,

struktur pengetahuan dan formasi wacana. Dalam pandangannya setiap jaman, memiliki ketiga hal tersebut secara berbeda. Foucault berbicara tentang bentuk wacana tersebut dapat tinggal dan berada dalam wujud yang berbeda-beda seperti dalam dokumen-dokumen, patung-patung, lukisan-lukisan, puisi, lagu, pemberitaan dan lain sebagainya.

Atas dasar pertimbangan tersebut, sumber referensial sebagai objek kajian sekaligus dalam tulisan ini adalah Kompas dengan mengambil materi-materi yang ada di dalamnya pada kisaran bulan April sampai dengan Mei 1998. Fase ini dalam pandangan dan pertimbangan penulis sebagai waktu paling krusial yang memperlihatkan bagaimana kekuatan kapitalisme dunia melakukan intervensi ekonomi politik pada saat pemerintah Indonesia berusaha menyelesaikan krisis ekonomi yang bersifat multidimensional.

Teknik pengumpulan data menggunakan tiga cara yang lazim digunakan. Pertama, adalah analisis isi terhadap teks-teks yang disajikan dalam surat kabar tersebut. Teks-teks dalam surat kabar tersebut dalam perspektif wacana yang dikemukakan Foucault adalah artifak komunikasi. Bentuk artifak komunikasi ini dikaji berdasarkan prinsip-prinsip wacana yang dipakai dalam pendekatan Foucault, yakni apa yang telah dihasilkan dalam struktur konseptualnya, bagaimana struktur pengetahuan yang telah diproduksi dan bagaimana formasi wacana yang dapat dicermati.

Untuk kepentingan kehandalan hasil penelitian, teknik pengumpulan data yang lain adalah melalui wawancara. Proses konstruksi terhadap artifak komunikasi dilakukan juga melalui subyek pelaku sepanjang hal ini mungkin dilakukan dan menguatkan tafsiran terhadap hasil penelitian. Jika hal ini tidak mungkin, penguatan ini dilakukan dengan sumber-sumber lain seperti dokumen, pernyataan pada lokasi dan tempat yang berbeda, atau data-data pendukung lainnya.

Dalam pengembangan kehandalan hasil penelitian hal yang paling penting dalam kaitannya dengan paparan tulisan ini adalah

validitas kontekstual. Menurut Diessing (1972:147-148) validitas kontekstual ini terdiri dari dua bentuk. Pertama, validitas terhadap bukti-bukti yang harus dibandingkan dengan bukti-bukti yang lain. Kedua, adalah evaluasi terhadap sumber dan bukti dengan mengumpulkan jenis-jenis sumber yang lain untuk melokasikan pola dan karakteristik distribusi sumber.

Adapun data diolah dan ditata berdasarkan prosedur yang terdiri dari tiga proses, yakni pengumpulan data, reduksi data, dan sajian data. Seperti yang telah dijelaskan bahwa pengumpulan data terdiri dari wawancara, analisis teks dan penguatan dari sumber yang lain. Reduksi mencakup pemilihan dan pemilahan terhadap data yang berhasil dikumpulkan. Sedangkan sajian data lebih merupakan runtutan dan sistematika logis dari hasil penelitian yang telah berhasil diuraikan.

Dari ketiga hal ini dipakai untuk menarik kesimpulan setelah semua diteliti kehandalannya. Jika kehandalan hasil dan kesimpulan yang diperoleh dirasakan belum dan kurang kuat, terbuka kemungkinan untuk melakukan proses pengumpulan data lagi mengikuti prosedur dan proses semula. Dengan tahapan tersebut, proses ini dapat diujikan kembali sehingga sudut pandang yang diambil dalam penelitian ini dapat direkonstruksikan kembali (Huberman and Miles, 1994:428)

Hasil Penelitian

Wacana Media tentang Krisis Ekonomi

Jejak-jejak komunikasi (baca: berita) sebagai wujud penting bagaimana wacana tentang kekuatan kapitalisme mengintervensi sistem perekonomian pada tahun 1998-an, dapat dilihat di surat kabar. Dalam periode April-Mei 1998, intensitas pemberitaan tentang pemulihan ekonomi di Indonesia khususnya cara-cara kekuatan kapitalisme dunia memberi resep solusi, sangat tinggi. Lembaga keuangan dunia seperti IMF, WB ADB (*Asia Development Bank*), BOJ (*Bank of Japan*), dan Deutge Bank (Jerman) menjadi materi pemberitaan yang menyangkut solusi dan penyelesaian krisis.

Prinsip-prinsip ekonomi liberal yang dipersyaratkan IMF dan WB menjadi tema yang dipilih, diseleksi dan ditonjolkan surat kabar, seolah sebagai resep yang ampuh untuk mengakhiri berbagai kemelut ekonomi sebagai akibat salah urus yang dilakukan rezim Orde Baru selama 32 tahun lamanya. Pada saat bersamaan, tema lain yang memperkuat hal tersebut, mendorong agar pemusatan praktek ekonomi dan politik yang hanya terdistribusi di sekitar lingkaran kekuasaan kroni dan keluar Presiden Soeharto juga diakhiri. Sasaran penonjolan pemberitaan pada periode itu, menunjukkan lemahnya komitmen pemerintah Indonesia pada program restrukturisasi yang membongkar praktek-praktek ekonomi tersebut yang bertumpu pada kroni dan keluarga Soeharto.

IMF dan WB ditempatkan sebagai kekuatan misi penyelamat terhadap permasalahan yang dihadapi Indonesia. Ruang lingkup permasalahan dan krisis ini adalah: a) harga sembilan kebutuhan pokok naik secara drastis; b) angka kemiskinan meningkat. Menurut Basri dan Iswara (2000:27), angka kemiskinan ini menjadi 80 juta orang Indonesia hidup miskin; c) tingkat pengangguran meluas mencapai 5,4 juta orang kehilangan pekerjaan; d) dan kerusakan terjadi di mana-mana. Sebagaimana diketahui bahwa pada tahun anggaran 1998/1999, pemerintah mengasumsikan kurs rupiah pada level Rp 5000,- yang parameternya menggunakan acuan harga minyak mentah dunia sebesar US\$17/ barel. Namun secara riil, di pasar, pada bulan Mei 1998, kurs rupiah terhadap dolar AS mencapai Rp 8000,- lebih (YKPI, 2000:11).

Melalui pemberitaan itu, diketahui bagaimana pemerintah berusaha keras mengendalikan pergerakan kurs rupiah yang masih tidak stabil. Stabilitas ekonomi dan politik yang menjadi dasar legitimasi rezim Orde Baru pada saat itu seperti dijungkirbalikkan sehingga menimbulkan ketidakpercayaan secara meluas di kalangan rakyat Indonesia. Pemerintah digambarkan sebagai pelaku yang gagal dalam upayanya menyelesaikan krisis. Langkah menaikkan suku bunga bank yang tinggi sampai

mencapai 45 persen justru dinilai memperburuk situasi. Intervensi pasar yang dilakukan BI (Bank Indonesia) hingga mencapai 10 milyar dolar AS, tetap tidak mampu mengendalikan anomali mata uang rupiah di pasar uang yang ada.

Bahkan pada level tertentu, pemerintah tidak lagi memiliki ruang untuk melakukan kebijakan yang menjadi pilihan sendiri. Sebab saat bersamaan, apapun yang dilakukan pemerintah, tidak begitu saja dapat dilakukan tanpa persetujuan dan ijin dari IMF dan WB sebagai kompensasi atas dikurkannya dana yang dipinjamkan kepada pemerintah Indonesia. Misalnya, pemerintah berencana menerapkan CBS (*Currency Board System*), namun belum lagi rencana itu dilakukan, buru-buru pemerintah mengumumkan tidak akan menerapkan sistem itu. Pemerintah mengatakan bahwa sistem dewan mata uang tidak lagi menjadi agenda pemerintah dan akan melaksanakan paket reformasi ekonomi yang telah disepakati dan ditandatangani Indonesia dengan IMF. Sementara IMF sendiri secara terang-terangan menyatakan bahwa Indonesia akan membayar mahal jika kembali mengingkari apa yang telah disusun bersama.

Media menyajikan berbagai pertarungan kepentingan yang termanifestasikan dalam pertarungan simbolik dan pernyataan verbal antara pemerintah dan lembaga keuangan dunia khususnya IMF. Melalui serangkaian perundingan yang panjang, pada akhirnya IMF menjanjikan memberi bantuan pinjaman sebesar 43 milyar dolar AS yang digalangnya dari 13 lembaga keuangan dunia lainnya. IMF sendiri menjanjikan sebesar 5 milyar dolar AS, WB menjanjikan 1 milyar dolar AS, dan ADB sebesar 1,5 milyar dolar AS.

Dalam realisasinya, apa yang dijanjikan tersebut, tidak serta merta dilaksanakan secara tepat waktu, tetapi mengalami penundaan, tarik ulur dan perang pernyataan yang sesungguhnya mencerminkan keinginan IMF dan WB yang mendiktekan kepentingan liberalisasi ekonomi, sedangkan dipihak lain keengganan pemerintah melakukannya terkait dengan konsekuensi yang ditimbulkan karena diterapkan secara

radikal dan tiba-tiba. Agenda kepentingan IMF dan WB adalah melakukan liberalisasi ekonomi, menghapus perdagangan kroni, dan mengeliminir sedemikian rupa intervensi negara dan pemerintah terhadap pasar serta HAM dan pelanggaran kemanusiaan, lingkungan dan represi terhadap aktivis demokrasi.

Sebagian diskursus yang dipaparkan tersebut merupakan bentuk-bentuk konflik kepentingan yang dapat dipahami dari struktur konseptual, struktur pengetahuan dan formasi wacana yang dapat dilihat dari surat kabar Kompas. Isu pokok yang disajikan Kompas adalah hasil serangkaian perundingan antara pemerintah dan IMF. Tokoh utama yang sering dimunculkan Kompas dalam persoalan ini antara lain Michael Camdessus, Hubert Neiss, sedangkan dari pemerintah seperti Fuad Bawazier, Ginanjar Kartasasmita, Radius Prawira, dan Widjojo Nitisastro.

Secara lebih terperinci, Kompas jika dicermati, menyajikan sejumlah formasi wacana yang terdiri dari; a) formasi wacana tentang suku bunga yang tinggi; b) formasi wacana penundaan pencairan dana bantuan pinjaman IMF karena dinilai pemerintah tidak menunjukkan komitmen untuk melaksanakan kesepakatan; c) dan formasi wacana pihak swasta yang tidak mampu membayar hutang luar negeri. Dari masing-masing formasi wacana tersebut, di dalamnya terdapat penjelasan dan paparan yang menunjukkan narasi yang memperlihatkan sudut pandang, kepentingan dan relasi kekuasaan yang sedang terjadi.

Formasi wacana tentang penundaan pencairan dana bantuan IMF misalnya, Kompas memberi tekanan adanya keterkaitan antara pencairan ini dengan isu-isu politik lainnya, demokratisasi dan pemerintahan yang bersih dari KKN. Kompas mengutipkan pernyataan senator AS yang secara eksplisit meminta kepada IMF agar pengucuran dana bantuan kepada Indonesia ditunda terkait dengan peristiwa-peristiwa sosial dan politik yang terjadi seperti peristiwa penembakan mahasiswa Tri Sakti.

Sangat mudah dipahami, penerimaan

pemerintah terhadap persyaratan IMF untuk melakukan liberalisasi ekonomi, karena pemerintah, tidak mampu mengendalikan nilai tukar rupiah yang jatuh secara drastis. Kondisi yang memperokporandakan ini, dengan berat hati pemerintah harus menerima “kekalahan” atas kekuatan global yang mengambil keuntungan di tanah air. Produksi pesan dan wacana yang dihasilkan media umumnya termasuk Kompas, tidak terdorong sedikitpun untuk berusaha mempertahankan rezim Orde Baru. Bahkan untuk mempertahankan kedaulatan ekonomi pun hampir-hampir tidak ditemukan dalam produksi wacana di surat kabar seperti Kompas yang diteliti ini.

Dalam formasi wacana politik dan retorika politik yang berkembang, ada tiga arena kontestasi yang dominan. Pertama, arena kontestasi di mana posisi pemerintah menyalahkan adanya sekelompok orang luar yang memang sengaja menggoyang stabilitas ekonomi Indonesia; b) adanya spekulator yang menggoyang dan mengambil keuntungan di Indonesia; dan c) adanya agenda tersembunyi dari Barat. Kompas, tidak menyajikan bentuk komunikasi perlawanan terhadap wacana besar yang dihembuskan IMF dan WB tentang praktek-praktek perekonomian di Indonesia.

Tekanan-tekanan ini berasal dari para pemimpin politik dunia Barat, para penyandang dana, para senator di Kongres AS, dan direktur-direktur bank dunia. Pernyataan-pernyataan mereka satu sama lain menguatkan dan memiliki pesan yang relatif sama. Penundaan pencairan dilakukan dengan dalih pelanggaran HAM dan berbagai bentuk kekerasan yang merupakan bagian dari skema mereka terhadap Indonesia. Jika diingat, Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri terjadi hanya selang beberapa jam ketika Madeleine Albright (*US Secretary of State*) mendesaknya untuk melakukan tindakan bersejarah sebagai seorang negarawan bagi demokratisasi di Indonesia. Tafsiran terhadap tindakan bersejarah sebagai seorang negarawan ini adalah mengundurkan diri sebagai seorang presiden yang memang diinginkan oleh

berbagai pihak termasuk pihak-pihak asing yang berkepentingan.

Presiden Soeharto sendiri mengatakan bahwa ada kekuatan asing yang membuat dirinya keluar- *a foreign power made me quit* (Kivimaki, 2000). Presiden Soeharto memproyeksikan dan sudah meramalkan, bila semua persyaratan dan tekanan dunia internasional diikutinya, maka para pengikutnya akan meninggalkan satu per satu. Pada tanggal 3 Maret 1998, Presiden Bill Clinton mengirimkan wakilnya Walter Mondale dan bertemu secara personal dengan Presiden Soeharto, yang di dalam pertemuan itu, Mondale kembali menekankan pentingnya pemerintah Indonesia menaati ketentuan-ketentuan yang disyaratkan IMF.

Presiden Soeharto mengatakan yang kurang lebihnya: Jika saya melakukannya, mereka akan membuang saya keluar dari kantor ini (Smith, 2003). Inilah kejadian-kejadian komunikasi yang disajikan media khususnya Kompas dalam melihat dan mempotret sebagian realitas dan praktek-praktek wacana yang terjadi antara pemerintah Indonesia dan kekuatan kapitalisme dunia.

Potret Media: Inferioritas Indonesia terhadap Kekuatan Kapitalisme

Timo Kivimaki (2000) secara sarkastis mengatakan bahwa sejak 1 Desember 1997, ketika IMF dan lembaga keuangan dunia lainnya terlibat dalam pemulihan ekonomi di Indonesia, maka sejak itu, Indonesia tidak ubah sebagai *Republic of IMF*. Sebutan ini untuk mengilustrasikan betapa lemahnya posisi Indonesia di hadapan IMF. Pemerintah Indonesia dikendalikan oleh IMF melalui persyaratan yang harus ditaati, direview dan dievaluasi.

Hal ini terlihat pada: a) asumsi perekonomian yang telah disusun DPR dan pemerintah mengenai RAPBN 1998/1999 misalnya, ternyata terkoreksi berdasarkan keinginan IMF; b) pertumbuhan ekonomi yang dipatok nol persen menjadi minus empat persen; c) tingkat inflasi ditentukan oleh IMF; d) privatisasi BUMN; e) Badan Penyangga

Pemasaran Cengkeh dibubarkan; f) menaikkan harga BBM sampai 71% untuk jenis premium Berikut petikan yang memperlihatkan inferioritas tersebut:

Presiden menjelaskan bahwa pemerintah membentuk BPPC melalui Kepres No 20 tahun 1992 selaras dengan kesepakatan IMF, badan itu paling lambat harus dibubarkan pada tanggal 30 Juni 1998. Namun ditegaskan bahwa pembubaran itu bisa dilakukan lebih cepat (Kompas, 5 Mei 1998)

Kebijakan pemerintah menaikkan BBM dan Tarif Dasar Listrik, mendapat reaksi keras dari DPR. Kenaikan ini karena secara langsung menyentuh kehidupan rakyat Indonesia. Sementara persoalan yang melilit dunia perbankan, pemerintah tetap mensubsidinya hingga mencapai 103 triliun rupiah. Padahal subsidi untuk energi khususnya BBM dan listrik hanya sebesar Rp 27 triliun. Sekali lagi langkah ini ditempuh karena keinginan IMF. Begitu arogannya, Michael Camdessus, pernah mengancam bahwa IMF sangat digdaya dalam memberikan resep pemulihan ekonomi. Camdessus mengatakan: "Indonesia tidak mempunyai pilihan apa pun selain menjalankan secara konsisten semua program yang telah disepakati. Indonesia akan membayar mahal jika kembali apa yang disusun bersama (*Republika*, 18 April 1998).

Tokoh-tokoh sentral lain yang berada dalam poros kekuatan kapitalisme global ini juga menyebutkan bahwa Indonesia tidak memiliki ruang dalam menyelesaikan sistem perekonomian yang sedang mengalami kesulitan kecuali berpaling pada lembaga-lembaga keuangan dunia. Denis de Tray (Kepala WB perwakilan Jakarta) memastikan bahwa Indonesia mengalami jalan buntu dalam menyelesaikan krisis ekonomi. Menurutnya, pemerintah Indonesia harus menyadari tidak ada obat ajaib yang dapat menyembuhkan krisis ekonomi ini dengan segera. Langkah-langkah yang dipersyaratkan IMF merupakan tahapan yang memang harus ditempuh lebih dahulu agar

memperoleh kepercayaan kembali (*Republika*, 8 April 1998).

Sebaliknya, ketika semua persyaratan dipenuhi dengan akibat langsung penderitaan bagi rakyat Indonesia secara keseluruhan, para penyeru ekonomi liberal dan kapitalisme ini merasa senang dan gembira sehingga mereka tanpa ragu memberi pujian. Hal ini tampak dari apa yang disampaikan Camdessus:

*Pemerintah Indonesia kini telah menunjukkan komitmennya terhadap paket reformasi yang telah direvisi. Kami terus mengamati bahwa seluruh tindakan pendahuluan seperti yang telah dijanjikan telah dilaksanakan sebelum pertemuan dewan direksi. Jadi sayakini dalam posisi merekomendasikan kepada dewan direksi bahwa hal yang paling tepat adalah mencairkan kontribusi untuk Indonesia (*Republika*, 5 Mei 1998)*

Kegembiraan lain juga diekspresikan Wakil Menteri Keuangan AS Lawrence Summers yang mengatakan bahwa ekonomi Asia Tenggara sudah tidak lagi dalam bahaya. Menurutnya karena Korea Selatan, Thailand dan Indonesia telah mengambil langkah besar ke arah pemulihan dan stabilitas. Kegembiraan semacam ini sebagai semestinya ketika apa yang menjadi kepentingan dari lembaga kekuatan keuangan kapitalisme ini terpenuhi. Menurut Alan Wood dan Ted Grant-polisi keuangan internasional yang bernama IMF dan WB itu mengawasi implementasi reformasi ekonomi yang dipersyaratkannya, ibarat seekor rajawali bertengger untuk memastikan bahwa setiap sen hutang itu terbayar atas penderitaan akibat sanksi-sanksi yang pedih.

Krisis ekonomi yang telah terjadi pada tahun 1998 lalu itu, yang dampaknya dapat dirasakan sampai sekarang, justru proses perubahan, penanganan dan kendalinya dilakukan oleh kekuatan yang berasal dari luar. Lembaga keuangan raksasa dunia telah mengambil peran penting dan begitu besar yang mendiktekan kepentingannya di tengah-tengah krisis tanpa mepedulikan seberapa luas dan resiko bagi penduduk yang ada di dalamnya. Kekuatan

ekonomi kapitalisme ini secara perlahan tetapi pasti telah mengambil semua keuntungan dan sukses menjadikan Indonesia sebagai objek yang dikendalikan untuk kepentingan liberalisasi dan ekonomi pasar bebas.

Kontra wacana terhadap hegemoni kapitalisme di Indonesia justru dapat didengar dari tokoh dan para pengamat luar negeri. Suara perlawanan hampir-hampir tidak dapat didengar dari tokoh-tokoh nasional Indonesia. Seolah ini menyakinkan pada suatu kenyataan bahwa mental survivalitas bangsa ini tidak ada lagi kecuali mental para pemimpinnya yang pasrah dan menerima keadaan begitu saja dan menyalahkan rezim Orde Baru beserta kroninya sebagai penyebab dari semua krisis yang terjadi. Harga survivalitas ini telah dibeli oleh sebuah kepentingan tertentu sehingga sampai sekarang sangat sulit menemukan kepemimpinan yang mampu membawa perubahan yang signifikan bagi kemandirian untuk bangsa dan negaranya.

Isher Judge Ahliwalia yang bekerja pada lembaga India untuk urusan Hubungan Ekonomi Internasional, Kompas mengutip pernyataannya bahwa IMF tidak efektif menangani krisis dengan datang terlambat dan menuntut strukturisasi besar-besaran, yang justru menghasilkan banyak kerusakan. Krisis ekonomi dimaksudkan sebagai pemicu untuk menggoyang stabilitas mata uang suatu negara yang membawa sifat kerusakan menyeluruh hingga menumbangkan suatu rezim kekuasaan tertentu.

Dengan maksud melepaskan diri terhadap apa yang terjadi pada dimensi sosial, politik dan budaya suatu negara, IMF mengatakan bahwa reformasi ekonomi merupakan program Indonesia dan bukan merupakan program IMF. Sikap ini memperjelas IMF dan semua lembaga keuangan dunia lainnya bahwa apa pun yang terjadi dengan Indonesia sebagai akibat penerapan reformasi ekonomi adalah persoalan Indonesia sendiri. Sedangkan pihak IMF hanya berkepentingan memastikan bahwa setiap sen uang yang dipinjamkan tersebut dapat dikembalikan dengan cara-caranya.

Di sisi lain, para pemimpin dunia

penganjur ekonomi pasar dan liberalisasi ekonomi, dan pada saat bersamaan IMF dan lembaga keuangan dunia, tidak mau tahu tentang berbagai kerusakan sosial, politik dan keamanan, yang terjadi, menuntut agar pemerintah Indonesia tidak bersikap represif terhadap para pemrotes. Mereka mensimplikasi persoalan demonstrasi, kerusakan dan penjarahan yang terjadi sebagai sesuatu yang mereka sebut semua sebagai *protesters* (Jakarta, Post, 14 Mei 1998)

Mereka secara terbuka menghendaki rezim kekuasaannya yang sedang berjalan diganti. Pemimpin partai buruh Australia misalnya secara terang-terangan menginginkan adanya transisi dan perubahan politik (*The Jakarta Post*, 15 Mei 1998). Robin Cook bahkan mengatakan bahwa Indonesia akan membayar mahal bagi pengabaian peringatan-peringatan tentang kebebasan sipil bagi kesuksesan ekonomi. Tekanan politis ini langsung datang dari Washington. Madeleine Albright secara terang-terangan meminta Presiden Soeharto mundur.

Bersamaan dengan itu, kapal induk Angkatan Laut AS Belleu Wood dan dua kapal induk pendukung dengan kekuatan 2000 marinirnya diperintahkan ditempatkan di utara Jakarta. Sebuah pernyataan tekanan muncul dari William Cohen Menteri Pertahanan AS: Pasukan Grup Siaga Amphibi Marinir (ARG) akan tetap di dekat wilayah Indonesia untuk melakukan misi apapun yang mungkin diperlukan nanti (*Suara Merdeka*, 17 Mei 1998).

Sebagai gambaran terhadap betapa buruknya situasi yang terjadi sebagai akibat perilaku masyarakat yang kalap terhadap berbagai gejala ekonomi sebagai akibat penerapan prinsip-prinsip liberalisasi ekonomi yang sangat drastik, tercatat untuk DKI Jakarta, kerugian ekonomisnya mencapai Rp 2,5 triliun. Jumlah bangunan yang rusak mencapai 4.939 bangunan dengan rincian 13 unit pasar, mal, swalayan, toko, bengkel, dan restoran sebanyak 4.204, bangunan bank sebanyak 157, pom bensin sebanyak 9, gereja sebanyak 2 bangunan dan rambu-rambu lalu lintas sebanyak 512 unit (Alit, 1998:231)

Ekspektasi yang Bertumpu pada Ketergantungan

Dalam periode bulan April-Mei 1998, surat kabar Kompas memotret harapan-harapan pemerintah Indonesia terhadap sejumlah kondisi yang dapat meringankan beban ekonomi, sosial, politik, dan budaya masyarakat Indonesia kepada lembaga-lembaga keuangan dunia dan negara-negara yang bermaksud membantu Indonesia. Potret besar yang dilukiskan surat kabar Kompas ini mencerminkan adanya ketergantungan tertentu.

Ada banyak masalah yang dipaparkan surat kabar Kompas selama periode tersebut, yakni: a) soal pencairan dana segera; b) harapan Negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam dan Australia segera berpartisipasi dalam memberi bantuan ekonominya kepada Indonesia; c) harapan dikabulkannya *roll over* hutang swasta di Indonesia selama 4 tahun; d) harapan kurs rupiah berada pada level normal; e) harapan pertumbuhan ekonomi yang tidak minus empat; f) dan harapan agar pencairan dana tidak dikaitkan dengan motif politik tertentu.

Harapan-harapan ini muncul sesuai dengan situasi psikologis dan sosiologis terhadap beban permasalahan yang dirasakan. Dalam soal utang swasta misalnya, persoalannya jauh lebih rumit dan menyita cadangan anggaran negara yang sangat besar jika cadangan ini digunakan. Ada lebih 800 perusahaan swasta yang tidak mampu lagi membayar hutang-hutangnya kepada kreditur luar negeri karena kurs rupiah terdevaluasi sedemikian tinggi hingga mencapai 250 persen. Data resmi dari Bank Indonesia, jumlah hutang swasta mencapai 67,69 milyar dolar AS.

Sebagai media yang mengkonstruksikan struktur pengetahuan dan konseptual, surat kabar Kompas kemudian membangun formasi wacana tentang hutang ini lebih mendetail dengan melibatkan analisis dan sumber-sumber lain dalam memperkaya praktek-praktek wacana tentang hal ini. Dalam sajian surat kabar Kompas

menjelaskan bahwa lonjakan hutang perusahaan swasta ini terjadi pada tahun 1991 sampai dengan 1992 yang melonjak dari 7 milyar dolar AS sampai 17 milyar dolar AS.

Dengan demikian aliran modal ini sangat besar sehingga pada periode itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperhitungkan. Tetapi sebenarnya, menurut surat kabar Kompas dengan mengutip pendapat Kwik Kian Gie, bahwa pertumbuhan ini sebenarnya semu. Karena itu, pemerintah Indonesia menolak secara tegas *bailout* (memberi talangan) kepada perusahaan-perusahaan itu. Sebab jika tindakan ini dilakukan kondisi pemerintahan yang akan jatuh. Hal yang dapat dilakukan adalah memfasilitasi dengan pihak kreditur luar negeri dan mengharapkan adanya *roll over*. Sjahril Sabirin (*Republika*, 17 April 1998) menyatakan bahwa pemerintah Indonesia telah berusaha sekuat tenaga agar kreditur bersedia *me-roll over* atau menunda pembayaran, karena swasta Indonesia tidak mempunyai kemampuan lagi membayar pinjaman.

Langkah-langkah ini dimaksudkan secara simultan dapat memperkuat kurs rupiah sebagai bagian dari harapan yang lain. Namun upaya-upaya tersebut, tidak cukup signifikan dan menyakinkan bagi pergerakan pasar modal di Indonesia, yang melemah 0,691 poin (BEJ-Bursa Efek Jakarta) dan 2,296 poin (BES-Bursa Efek Surabaya). Ini merupakan indikator bahwa dinamika pasar modal juga lesu.

Di tengah sejumlah harapan yang dibangun dan dibangkitkan surat kabar Kompas, secara hampir bersamaan menuliskan editorialnya secara tajam tentang harapan-harapan itu (*Kompas*, 8 Mei 1998). Dalam editorial itu, surat kabar ini tidak memberi kritik terhadap langkah-langkah yang dipersyaratkan IMF dan WB sebagai bagian dari persoalan yang ditimbulkan. Struktur konseptual dan pengetahuan serta formasi diskursif yang disajikan Kompas, lebih banyak menyoroti persoalan-persoalan bobroknya praktek ekonomi yang selama ini dilakukan. Dengan demikian, ini jalan yang menjembatani sasaran akhir bahwa pemerintahan

Orde Baru telah gagal dan harus diakhiri.

Kompas mempertanyakan: Apa salah kita sebenarnya? Menurut harian ini, persoalannya sudah jauh dari masalah ekonomi semata. Estimasi, harapan atau pun kepercayaan pasar sudah diporakporandakan oleh kondisi yang berkembang dalam bidang sosial dan politik. Kompas secara terbuka menyebutkan bahwa persoalan ini sebagai akibat adanya kesalahan akumulatif yang telah ditimbulkan lama dan terpendam dalam rezim Orde Baru. Dengan perkataan lain, Kompas menerima sepenuhnya bahwa akibat semua ini berasal dari praktek dari rezim yang korup dan tidak ada sisi terang selama kekuasaan tersebut berlangsung.

Dalam harapan besar yang sebenarnya sangat tergantung pada bayang-bayang kekuatan lembaga keuangan dunia sebagaimana telah dipaparkan, Kompas menurunkan editorial reflektif di seputar harapan-harapan tersebut. Dalam tulisan editorialnya Kompas mengatakan:

Persoalannya memang, segala sesuatunya menjadi serba tidak mudah, karena kita benar-benar berpacu dengan waktu. Dalam hal ini kita kuatirkan benar bahwa tendensi munculnya kerusuhan-kerusuhanakan semakin memperburuk keadaan, memperburuk kinerja ekonomi dan pada akhirnya membuat beban ekonomi rakyat dan Negara semakin berat. Oleh sebab itu, sikap menahan diri pada satu sisi dan keseriusan melakukan reformasi di bidang-bidang nonekonomi pada sisi lain, benar-benar menjadi pertarungan kita pada saat ini (Kompas, 8 Mei 1998)

Harapan yang tercermin dalam editorial Kompas memperlihatkan kompleksitas masalah yang dihadapi. Pada sudut tertentu, Kompas menunjukkan krisis ekonomi, bukan merupakan faktor tunggal, meskipun tidak menunjuk pada relasi kerumitan antara ekonomi dan politik. Kompas lebih membangun formasi wacana pada pentingnya pemahaman bahwa sinergi usaha-usaha reformasi di bidang ekonomi dan

nonekonomi seperti politik, keamanan dan hukum juga mempunyai daya penyelesaian yang penting.

Sampai sejauh itu Kompas menyajikan harapan-harapan besarnya dalam bingkai ketergantungan dan tekanan. Harapan tentang hasil perundingan, pengucuran dana, dan harapan tentang stabilitas kurs rupiah terhadap dolar AS bukan pilihan yang dapat diupayakan sendiri, melainkan lebih dari permintaan belas kasihan atas hegemoni dan kekuatan kapitalisme itu. Pendek kata Kompas memberitahukan kepada rakyat Indonesia bahwa harapan-harapan itu bukan sesuatu yang dapat diwujudkan atas kemandiriannya sendiri dan dapat diwujudkan dalam waktu yang singkat dan segera. Harapan-harapan itu lebih bergantung pada keseriusan pemerintah dalam mengikuti apa yang dianjurkan oleh IMF dan WB yang telah memberi resep tentang pemulihan tersebut berdasarkan sudut pandang dan kepentingannya.

Kesimpulan

Wacana tentang krisis ekonomi dan pemulihannya, dapat lebih dimengerti substansinya, jika wacana ini dihasilkan tidak semata-mata berangkat dari interpretasi teks sebagai arkeologi komunikasi yang ditinggalkan, melainkan melihatnya sebagai bagian dari formasi wacana yang lebih luas, kompleks dan penuh kontradiksi serta kepentingan. Berita sebagai bentuk komunikasi, bagaimana pun dihasilkan melalui proses produksi, pemilihan, perspektif, struktur konseptual yang berkembang, dan terbukanya pengetahuan baru yang semula hanya dikuasai oleh segelintir orang sehingga membentuk formasi wacana baru yang sangat berbeda dengan wacana-wacana sebelumnya.

Agenda media yang disajikan Kompas itu sendiri saling berkompetisi dengan agenda media yang lain. Namun kompetisi dalam produksi teks akan menghasilkan formasi wacana dalam masyarakat. Kompas sendiri memiliki kepentingan. Kepentingan langsung Kompas terhadap persoalan ini adalah likuiditas dan kurs rupiah yang normal. Kompas membangun

narasi sebagai *episteme*-bahwa di setiap jaman dan episode, terdapat formasi wacana yang tidak dapat diperbandingkan, dimulai dari krisis ekonomi.

Keseluruhan narasi Kompas menempatkan pemerintah Indonesia berada dalam bayang-bayang tekanan. Hampir tidak disampaikan bahwa di balik krisis yang terjadi, terdapat upaya-upaya spekulatif oleh kekuatan kapitalis ketika melihat bahwa ada 800 lebih perusahaan di Indonesia telah jatuh tempo untuk melakukan pengembalian utang ke luar negeri. Pembayaran utang ini dilakukan dengan menggunakan mata uang asing (baca:dolar AS).

Dengan demikian, Indonesia mengalami situasi di mana permintaan dolar AS sangat tinggi. Para spekulasi ini dengan kekuatan kapital yang dimilikinya mampu menyedot uang dolar ini menjadi langka dan terbatas sehingga nilai kurs rupiah menjadi tidak ada artinya sama sekali. Prestasi dan kinerja yang luar biasa menjadi tidak ada artinya sama sekali ketika pasar modal dapat dipertandingkan sedemikian rupa oleh para spekulasi yang semata-mata bermotif keuntungan.

Apa yang disebut keuntungan, surplus produksi, ongkos buruh yang murah, efisien dan efektifitas, yang telah dilakukan bertahun-tahun, direnggut sedemikian rupa ketika rupiah mengalami devaluasi yang sangat drastik. Perusahaan-perusahaan ini dipaksa untuk membayar hutang dengan mata uang asing yang langka. Satu-satunya cara yang dapat dilakukan adalah menyerahkan pendapatan rupiah yang dinilai sebagai keuntungan itu kepada para penghutang.

Ketidakterdayaan perusahaan itu diarahkan menjadi beban pemerintah. Negara-negara kreditur itu menghendaki agar pemerintah Indonesia melakukan *bailout* terhadap hutang-hutang tersebut. Sebuah cara sistematis yang didesain secara langsung atau tidak langsung meruntuhkan suatu sistem perekonomian dan sistem rezim yang berkuasa. Dalam kajian ini, Kompas tidak menyinggung logika dan alur demikian untuk membangun formasi wacana yang sebagai narasi dalam episode krisis

ekonomi di Indonesia. Kompas tidak pernah menyatakan bahwa segala penyebab dari krisis ekonomi adalah tidak bertanggung jawabnya perusahaan-perusahaan yang berhutang itu terhadap kemungkinan kejadian semacam ini.

Kompas sangat fokus menunjukkan bahwa persoalan ini terjadi karena sistem ekonomi yang korup dan rezim kekuasaan yang menerapkan ekonomi Negara sebagai ekonomi rente yang berpusat pada lingkaran elit kekuasaan yang terbatas dan kroninya. Ini bagian penting yang dapat digarisbawahi tentang formasi wacana tentang krisis ekonomi di Indonesia yang terjadi pada tahun 1998. Sekali lagi, setiap jaman menghasilkan episode dan narasi sebagai *episteme*-formasi wacana. Dengan melihat kembali bentuk arkeologi komunikasi masa lalu-yakni berita-berita tentang krisis ekonomi pada tahun 1998, kita dapat kembali melihat dan menginterpretasikan lagi bentuk-bentuk produksi komunikasi tersebut yang sering tidak mencerminkan keadilan kecuali memperjuangkan kepentingan.

Daftar Pustaka

- Alit, IGK, 1998, *Lahirnya Gerakan Reformasi di Indonesia*, Jakarta: DPP Forum Komunikasi Anak Bangsa
- Basri, Muhammad Chatib and Iswara Dana, 2000, *Exit, Voice and Loyalty: Ekonomi Politik Modal dan Peran Media di Masa Krisis*, Jakarta: Gramedia
- Berg, Andrew, 1999, *The Asia Crisis: Causes, Policy, Responses*, IMF Working Paper
- Camdessus, Michel, 1999, *Economic and Financial Situation in Asia: Latest Developments*, Paper, Asia Europe Finance Minister Meeting
- Foucault, Michael, 1991, *The Order of Things An Archeology of the Human Sciences*, New York: Vintage Books
- Guba, Egon G and Lincoln, Yvonna S, "Competing Paradigms in Qualitative Research," in Denzin, Norman K and Lincoln, Yvonna S, 1994, *Handbook of Qualitative Research*, London: Sage Publication

- Hill, David T, 2000, *Media Culture and Politics in Indonesia*, NY: Oxford University Press
- Huberman, A Michael and Miles, Mathew B, "Data Management and Analysis Methods,in Denzin,Norman K and Lincoln,Yvonna S, 1994, *Handbook of Qualitative Research*, London:Sage Publication
- Lippman, W, 1992, *Public Opinion*, NewYork: Macmillan
- Littlejohn, Stephen W, 2002, *Theories of Human Communications*, Albuquerque: Wadworth
- Kivimaki, Timo, "US-Indonesia Relation During The Economic CrisisWhere has Indonesia's Bargaining Power Gone? Journal Contemporary Southeast Asia, Volume 22 Year 2000
- Kunio, Yoshihara, 1990, *Kapitalisme Semu Asia Tenggara*, Jakarta: LP3ES
- Palan, Ronen, 2000, *Global Political Economy Contemporary Economy*, New York: Routledge
- Smith, Benjamin, 2003, *If I Do These Things, They Will Throw me Out*, Journal of International Affairs, Vol.57 Issues 1
- Shoemaker, Pamela J and Reese, Stephen D, 1996, *Mediating The Message Theories of Influences on Mass Media Content*, London: Longman
- Stiglitz, Joseph E, 2005,. *Dekade Keserakahan*, Jakarta: Marjin Kiri
- Forbes*, 21 Juni 1982
- Kompas*, 5 Mei 1998
- Kompas*, 8 Mei 1998
- Republika*, 8 April 1998
- Republika*, 17 April 1998
- Republika*, 18 April 1998
- Republika*, 5 Mei 1998
- Suara Merdeka*, 17 Mei 1998
- The Jakarta Post*, 14 Mei 1998
- The Jakarta Post*, 15 Mei 1998